

Pendidikan Multikultural dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Segresi Sosial di Lingkungan Pendidikan

*Multicultural Education in the Conception of Islamic Educational Philosophy:
Analysis of Social Segregation in the Educational Environment*

Eka Fitra Ramadani¹, Afifuddin Harisah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

* Correspondence e-mail: ekfira@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/05/15; Revised: 2025/06/10; Accepted: 2025/07/04

Abstract

Multicultural education from the perspective of Islamic educational philosophy becomes an important solution to the phenomenon of social segregation in the Indonesian educational environment. This article discusses the urgency of implementing multicultural education to create social justice and equality, emphasizing the importance of integrating Islamic values such as tolerance, justice, and compassion. The theological foundation of multicultural education in Islam is reflected in the principles of "li ta'arufu" and "rahmatan lil 'alamin," which encourage appreciation for diversity as a divine law. However, the reality in Indonesia still shows the existence of segregation based on religion and ethnicity, both in school structures and social interactions. Therefore, the systemic and sustainable implementation of multicultural education is essential to address discrimination, strengthen moderate Islamic identity, and build an inclusive and harmonious society amidst diversity. This article recommends the transformation of educational policies and practices into a more just and inclusive system.

Keywords

Education, Islamic, Multicultural.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Bentangan global yang kian terhubung memperlihatkan Indonesia sebagai anomali keberagaman nan memukau. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh 1.340 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2023), masing-masing dengan kekayaan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang tak terhingga. Tak hanya itu, spektrum keberagaman juga meluas hingga ke ranah keyakinan, dengan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebersatuhan dalam perbedaan ini diabadikan dalam semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika," sebuah filosofi luhur yang seharusnya menjadi fondasi kokoh bagi

pembangunan bangsa. Namun, di balik idealisme multikulturalisme ini, Indonesia menghadapi realitas yang kompleks. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru seringkali berhadapan dengan tantangan serius dalam pengelolaan sosial, termasuk di sektor pendidikan. Menurut Irawati (2021), keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia menuntut pendekatan pendidikan yang adaptif dan inklusif demi mencapai integrasi sosial yang harmonis, tanpa mengikis identitas masing-masing kelompok. Kondisi geografis kepulauan juga menambah kompleksitas, di mana perbedaan wilayah dapat memperkuat identitas kedaerahan dan memicu sentimen primordial yang berpotensi merusak kohesi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran krusial sebagai instrumen pemersatu, menumbuhkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman sekaligus memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Ironisnya, di tengah cita-cita persatuan, Indonesia justru menyaksikan fenomena segregasi sosial yang kian menguat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Himayatul (2022) menjelaskan bahwa segregasi dalam pendidikan bermanifestasi sebagai pemisahan siswa berdasarkan latar belakang agama, etnis, atau status sosial ekonomi, menciptakan kelompok-kelompok eksklusif dalam institusi pendidikan. Fenomena ini tidak terbatas pada pembentukan sekolah berbasis agama atau etnis tertentu, tetapi juga tampak dalam praktik diskriminasi halus di sekolah umum. Studi bahkan menunjukkan bahwa mahasiswa perantau dari Indonesia Timur di Yogyakarta mengalami segregasi sosial akibat pengelolaan perbedaan budaya yang belum optimal di lingkungan pendidikan (Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development, 2023). Hal ini menegaskan bahwa segregasi tidak hanya membatasi interaksi antar kelompok, tetapi juga berpotensi menumbuhkan stereotip dan prasangka yang terbawa hingga dewasa.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengidamkan warga negara yang toleran, demokratis, dan mampu hidup berdampingan. Salah satu paradoks mencolok dalam pendidikan Indonesia adalah jurang antara idealisme Bhinneka Tunggal Ika dengan realitas praktik pendidikan yang cenderung eksklusif. Meskipun secara konstitusional dan filosofis berkomitmen pada persatuan dalam keberagaman, sistem pendidikan belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai multikultural yang inklusif. Kurikulum pendidikan yang ada, meskipun telah mengalami reformasi, masih belum optimal dalam mengintegrasikan perspektif multikultural secara komprehensif. Bahkan, penelitian tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikulturalisme dalam Kurikulum Merdeka (Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2024) mengindikasikan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran.

Praktik pendidikan yang eksklusif juga terlihat dalam metode pembelajaran yang cenderung monokultur, di mana perspektif kelompok mayoritas menjadi standar utama, mengabaikan suara kelompok minoritas. Ini menciptakan hierarki budaya yang tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengembangkan nilai-nilai multikultural. Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) memiliki

landasan teologis yang kuat untuk mendukung pendidikan multikultural. Namun, potensi ini belum sepenuhnya teroptimalkan. Himayatul (2022) menegaskan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi media resolusi konflik dan menciptakan harmoni sosial, dengan mengajarkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, toleransi, dan persaudaraan. Urgensi pengembangan pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan Islam semakin mendesak mengingat jumlah siswa di lembaga pendidikan Islam yang sangat besar. Jika lembaga-lembaga ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural, kontribusinya dalam membentuk generasi Muslim yang toleran dan inklusif akan sangat signifikan. Terlebih lagi, di era globalisasi dan digitalisasi, pendidikan Islam dituntut untuk menyiapkan lulusan yang tidak hanya mampu berinteraksi dalam konteks lokal, tetapi juga global. Kemampuan memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan keberagaman budaya dan agama menjadi kompetensi esensial. Integrasi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam, karenanya, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan generasi Muslim menghadapi tantangan zaman. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter, termasuk di sekolah dasar inklusi, memberikan dampak positif dalam mengembangkan sikap toleran dan inklusif siswa mengindikasikan potensi besar pendidikan multikultural dalam mengatasi tantangan keberagaman di Indonesia.

Tujuan artikel ini adalah mengkaji urgensi penerapan pendidikan multikultural untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan sosial, dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Artikel ini diharapkan menjadi transformasi kebijakan dan praktik pendidikan menjadi sistem yang lebih adil dan inklusif.

2. METODE

Artikel ini mengkaji tentang pendidikan multikultural dalam konsepsi filsafat pendidikan Islam: analisis fenomena segregasi sosial di lingkungan pendidikan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka *atau library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan dan mendeskripsikan informasi dari berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, juga menganalisis, menginterpretasi, dan mensintesis data tersebut untuk menemukan pola, hubungan, atau kesimpulan baru. Adapun rangkaian kegiatannya termasuk (1) pengumpulan data pustaka melalui membaca, mencatat, menelaah, dan mengelola bahan yang diteliti. Data deskriptif yang disampaikan secara lisan atau tertulis dari sumber langsung atau perilaku yang diamati digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari buku, artikel, dokumen, catatan, dan sumber lain yang relevan. Metode yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman digunakan selama proses analisis data, menggunakan reduksi data, di mana wawancara dan studi dokumen yang menyeluruh digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dari catatan lapangan dan pengamatan. (2) Ide faktor determinan pendidikan dan (3) Terakhir, penarikan inti yang

didasarkan pada informasi dan data yang diperoleh dari hasil observasi, temuan, dan studi dokumen.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3. 1. Konsep Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan konsep yang telah berkembang pesat dalam dunia pendidikan kontemporer sebagai respons terhadap realitas keberagaman dalam masyarakat global. James A. Banks, yang dikenal sebagai pionir dalam bidang pendidikan multikultural, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai "suatu konsep, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang beragam akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah", Banks & Banks (2019). Definisi ini menekankan pentingnya transformasi struktural dalam sistem pendidikan untuk menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka.

Menurut Banks (2019), pendidikan multikultural memiliki lima dimensi utama yang saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara holistik untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif. Pertama, *content integration*: merujuk pada upaya guru untuk mengintegrasikan konten dari berbagai kelompok budaya dan etnis ke dalam kurikulum. Dimensi ini melibatkan penggunaan contoh, data, dan informasi dari berbagai kelompok budaya untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci dalam mata pelajaran. Kedua, *knowledge construction; process* berkaitan dengan sejauh mana guru membantu siswa untuk memahami, menginvestigasi, dan menentukan bagaimana pengetahuan implisit dari asumsi budaya, referensi, perspektif, dan bias dalam suatu disiplin mempengaruhi cara pengetahuan dikonstruksi, Maulidiah (2023). Ketiga, *prejudice reduction*: fokus pada karakteristik sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat dimodifikasi melalui metode dan materi pengajaran. Keempat, *equity pedagogy*: ada ketika guru memodifikasi metode pengajaran mereka sehingga dapat memfasilitasi prestasi akademik siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan sosial ekonomi. Kelima, *empowering school culture and social structure*: melibatkan perubahan kultur dan struktur sekolah sehingga siswa dari berbagai kelompok etnis, ras, dan sosial dapat mengalami kesetaraan dan pemberdayaan, Banks & Banks (2019). Kelima dimensi ini harus diimplementasikan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar multikultural.

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengembangkan kesadaran multikultural yang komprehensif pada siswa. Kesadaran ini meliputi pemahaman mendalam tentang keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman atau hambatan. Idris et al., (2024) menekankan bahwa pengembangan kesadaran multikultural dalam konteks pendidikan Islam bertujuan untuk memperkuat identitas Islam yang moderat, di mana siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai

spiritual dan moral yang kuat. Kesadaran multikultural ini mencakup kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, memahami kompleksitas identitas manusia, dan menghargai kontribusi setiap kelompok budaya terhadap peradaban manusia.

Membangun sikap toleransi dan respek terhadap perbedaan merupakan tujuan fundamental lainnya dari pendidikan multikultural. Toleransi di sini bukan hanya berarti menerima keberadaan orang lain yang berbeda, tetapi juga melibatkan apresiasi aktif terhadap keberagaman dan kemauan untuk belajar dari perbedaan tersebut. Maulidiah (2023) menjelaskan bahwa toleransi dalam konteks multikultural adalah "etika penerimaan dan penghormatan mutual yang melampaui perbedaan budaya, etnis, gender, linguistik, dan agama." Sikap respek terhadap perbedaan ini harus dikembangkan melalui interaksi langsung, dialog antarbudaya, dan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk memahami perspektif orang lain dari dalam (*insider perspective*).

Menciptakan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan tujuan transformatif dari pendidikan multikultural yang berusaha mengubah struktur kekuasaan dan privilese dalam sistem pendidikan. Keadilan sosial dalam konteks ini melibatkan eliminasi diskriminasi, penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi keadilan sosial dalam pendidikan multikultural memerlukan pendekatan yang sistemik dan berkelanjutan, melibatkan perubahan kebijakan, praktik pengajaran, dan kultur sekolah secara keseluruhan (Nasr, 2023).

3.2. *Filsafat Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*

Fondasi pendidikan multikultural dalam Islam tertanam kuat dalam ajaran-ajaran fundamental Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam konteks multikulturalisme adalah QS. Al-Hujurat: 13, yang menyatakan: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini mengandung prinsip fundamental tentang keberagaman sebagai sunnatullah (hukum alam Allah) yang harus diterima dan dihargai.

Konsep "li ta'arafu" (supaya kamu saling mengenal) dalam ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam dalam konteks pendidikan multikultural. Kata "ta'arafu" berasal dari akar kata 'arafa yang berarti mengetahui atau mengenal dengan baik. Ini mengimplikasikan bahwa keberagaman diciptakan bukan untuk saling bermusuhan atau berkompetisi secara destruktif, melainkan untuk saling mengenal, memahami, dan belajar satu sama lain. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menjadi landasan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang mendorong interaksi positif antarkelompok yang berbeda. QS. Al- Baqarah: 256 memberikan landasan yang kuat untuk prinsip kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan dalam beragama: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan

yang sesat." Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan menghormati kebebasan individu untuk memilih keyakinan mereka. Dalam konteks pendidikan multikultural, prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif di mana siswa dari berbagai latar belakang agama dapat belajar bersama tanpa merasa terpaksa atau terancam.

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret tentang penghormatan terhadap perbedaan dan keadilan. Salah satu hadits yang terkenal adalah: "Tidak beriman seseorang di antara kalian, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menekankan pentingnya empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks pendidikan multikultural, hadits ini menjadi landasan untuk mengembangkan sikap empati dan kepedulian sosial yang melampaui batas-batas kelompok.

Konsep *rahmatan lil 'alamin* (rahmat untuk semesta alam) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang memberikan landasan teologis yang kuat untuk pendidikan multikultural. Konsep ini menegaskan bahwa Islam dan umatnya hadir untuk memberikan manfaat dan keberkahan bagi seluruh alam semesta, termasuk semua makhluk hidup tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip *rahmatan lil 'alamin* mengimplikasikan bahwa pendidikan Islam harus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kelompok Muslim saja.

Implementasi konsep *rahmatan lil 'alamin* dalam pendidikan multikultural berarti bahwa institusi pendidikan Islam harus menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, di mana nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian diajarkan dan dipraktikkan. Idris et al. (2024) menekankan bahwa pendekatan multikultural dalam pendidikan Islam dapat memperkuat identitas Islam yang moderat dengan menjadikan prinsip *rahmatan lil 'alamin* sebagai panduan dalam berinteraksi dengan keberagaman. *Wasathiyah* atau moderasi beragama merupakan konsep kunci lainnya yang sangat relevan dengan pendidikan multikultural. Kata *wasath* dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 143 menggambarkan umat Islam sebagai "umat yang *wasath*" (umat yang moderat/tengah). Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam cara pandang terhadap perbedaan dan keberagaman. Dalam konteks pendidikan, *wasathiyah* menjadi prinsip untuk mengembangkan sikap yang seimbang antara mempertahankan identitas keagamaan yang kuat dengan keterbukaan terhadap perbedaan dan dialog antarbudaya.

Penerapan prinsip *wasathiyah* dalam pendidikan multikultural melibatkan pengembangan kemampuan untuk melihat isu-isu kompleks dari berbagai perspektif, menghindari ekstremisme dalam segala bentuknya, dan mencari solusi yang adil dan berimbang dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat meningkatkan toleransi dan mengurangi prejedis antarkelompok. Inayatullah (2022).

Al-Ghazali (1058-1111 M), seorang teolog dan filsuf besar Islam, memberikan kontribusi

penting terhadap konsep pendidikan karakter inklusif yang relevan dengan pendidikan multikultural kontemporer. Dalam karyanya *Ihya 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan akhlak yang universal, yang tidak hanya berlaku untuk Muslim tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah pembentukan karakter yang mulia (*husn al-khuluq*), yang mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi.

Konsep pendidikan karakter Al-Ghazali sangat relevan dengan pendidikan multikultural karena menekankan pengembangan nilai-nilai universal yang dapat menjadi titik temu antarkelompok yang berbeda. Al-Ghazali mengajarkan bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan untuk berempati dan memahami perspektif orang lain, yang merupakan kompetensi penting dalam masyarakat multikultural. Pendekatan holistik Al-Ghazali terhadap pendidikan, yang mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan sosial, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang komprehensif.

Ibn Khaldun (1332-1406 M), sejarawan dan sosiolog Muslim terkemuka, memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya interaksi sosial dalam proses pendidikan. Dalam *Muqaddimah*-nya, Ibn Khaldun mengembangkan teori tentang dinamika sosial dan pentingnya asabiyyah (solidaritas kelompok) dalam pembentukan peradaban. Namun, Ibn Khaldun juga menyadari bahwa interaksi dan pertukaran budaya antarkelompok yang berbeda merupakan motor penting dalam kemajuan peradaban.

Teori Ibn Khaldun tentang pentingnya interaksi sosial dalam pendidikan sangat relevan dengan pendidikan multikultural kontemporer. Ia menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui interaksi sosial yang intensif dan bermakna, bukan hanya melalui transfer pengetahuan yang pasif. Dalam konteks multikultural, ini berarti bahwa pendidikan harus menciptakan kesempatan untuk interaksi positif antarkelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok dapat belajar dari yang lain dan berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan bersama.

Ibn Khaldun juga mengakui bahwa keberagaman perspektif dan pengalaman dapat memperkaya proses pembelajaran dan menghasilkan inovasi. Pandangannya tentang siklus peradaban menunjukkan bahwa masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh eksternal dan mampu mengintegrasikan elemen-elemen baru cenderung lebih dinamis dan inovatif. Prinsip ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan pendidikan multikultural yang tidak hanya toleran terhadap perbedaan, tetapi juga mampu memanfaatkan keberagaman sebagai sumber kekuatan dan kreativitas.

3.3. Analisis Kasus: Segregasi Sosial Di Lingkungan Pendidikan

Segregasi berdasarkan agama dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Manifestasi segregasi agama dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan pembagian kelompok berdasarkan identitas keagamaan. Pertama, terdapat kecenderungan pembentukan institusi pendidikan yang homogen secara agama. Hal ini tercermin dalam banyaknya sekolah-sekolah berbasis

agama tertentu yang cenderung hanya menerima siswa dari kelompok agama yang sama. Meskipun secara formal tidak ada larangan bagi siswa dari agama lain untuk mendaftar, namun dalam praktiknya sering terjadi seleksi tidak tertulis yang mengutamakan calon siswa yang seagama dengan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan. Kedua, segregasi agama juga termanifestasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa sekolah cenderung mengintegrasikan nilai-nilai agama tertentu dalam seluruh aspek pembelajaran, yang secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang kurang nyaman bagi siswa dari agama minoritas. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi spasial agama berkontribusi pada polarisasi dan konflik antar kelompok agama dalam masyarakat urban, termasuk dalam lingkungan pendidikan (IAS Journal of Localities, 2024). Ketiga, praktik segregasi agama juga terlihat dalam interaksi sosial antar siswa. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Indonesia mengalami peningkatan dari 73,09 pada 2022 menjadi 76,47 pada 2024, namun tren intoleransi di kalangan siswa masih menjadi perhatian serius. Survei tahun 2023 menunjukkan sekitar 70,2 persen anak-anak remaja masih toleran, namun terdapat 24,2 persen yang berada dalam kategori toleran pasif, yang berpotensi berkembang menjadi intoleran aktif (Kompas.id, 2023).

Segregasi etnis dan budaya dalam pendidikan Indonesia menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, terutama terlihat dari pengalaman mahasiswa perantau dari Indonesia Timur. Studi kasus mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur dan Papua di Yogyakarta menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta antara mahasiswa dari Timur Indonesia dengan masyarakat lokal cenderung tidak harmonis akibat perbedaan kebudayaan (Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development, 2023).

Manifestasi segregasi etnis ini dapat diamati dalam beberapa bentuk. Pertama, terdapat kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan asal daerah atau etnis yang sama di lingkungan pendidikan. Mahasiswa dari daerah tertentu cenderung membentuk komunitas eksklusif yang jarang berinteraksi dengan kelompok lain. Kedua, stereotip dan prasangka terhadap etnis tertentu sering muncul dalam interaksi sehari-hari, menciptakan barrier invisible yang memisahkan kelompok-kelompok etnis.

Penelitian tentang keberagaman etnis Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan dari kelompok etnis tertentu memiliki pandangan tertentu dalam memutuskan besaran alokasi sumber daya rumah tangga untuk pendidikan. Keragaman etnis dalam suatu daerah telah menjadi preferensi baru dalam pengalokasian investasi pendidikan, yang secara tidak langsung menciptakan segregasi berbasis kemampuan ekonomi etnis tertentu (UGM Repository, 2024).

Segregasi berdasarkan status sosial ekonomi merupakan bentuk segregasi yang paling nyata dan mudah diidentifikasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Manifestasi segregasi ini sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek mulai dari akses pendidikan hingga kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Kasus diskriminasi siswa akibat tunggakan SPP yang terjadi di Medan pada Januari 2025 menjadi contoh konkret segregasi ekonomi dalam pendidikan. Seorang siswa kelas IV dipaksa duduk di lantai selama tiga hari karena

menunggak SPP sebesar Rp180.000, mencerminkan bagaimana status ekonomi dapat menjadi dasar perlakuan diskriminatif di lingkungan sekolah (Unismuh Makassar, 2025).

Infrastruktur pendidikan juga menjadi faktor penting dalam segregasi ekonomi. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan telah menjadi pilar penting dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, namun disparitas dalam infrastruktur pendidikan antara sekolah di daerah kaya dan miskin masih sangat signifikan (Mimbar Ilmu, 2024). Sekolah-sekolah di daerah dengan ekonomi yang baik memiliki fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan program pembelajaran yang beragam, sementara sekolah di daerah kurang mampu mengalami keterbatasan dalam semua aspek tersebut.

Kasus segregasi di sekolah umum menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia. Salah satu studi kasus yang menarik perhatian adalah fenomena perundungan (*bullying*) yang sering kali memiliki basis segregasi sosial. Penelitian di SMP Negeri 14 Kota Medan menunjukkan bahwa perundungan dalam berbagai bentuknya masih menjadi masalah yang meresahkan di lingkungan sekolah, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini (Indonesian Culture and Religion Issues, 2024).

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga September 2024. Angka ini mencerminkan kondisi yang mengkhawatirkan terkait dengan harmoni sosial di lingkungan pendidikan (Kompas, 2024). Studi kasus lain yang relevan adalah kesulitan yang dihadapi siswa dari wilayah terpencil dalam mengakses pendidikan berkualitas. Tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa segregasi geografis dan ekonomi saling berkaitan dalam menciptakan kesenjangan pendidikan yang signifikan (Sekretariat Negara, 2024).

Dampak segregasi sosial terhadap siswa sangat multidimensi dan berkelanjutan. Pertama, dampak akademis yang signifikan terlihat dari penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa yang mengalami segregasi. Penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial di lingkungan sekolah dapat menghambat perkembangan akademis dan psikologis mereka (Journal of Education Research, 2024). Kedua, dampak psikologis yang serius meliputi penurunan harga diri, kecemasan sosial, dan pembentukan identitas negatif. Siswa yang mengalami segregasi cenderung mengembangkan perasaan tidak berharga dan inferior, yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Ketiga, dampak sosial jangka panjang berupa keterbatasan kemampuan berinteraksi lintas kelompok. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan yang tersegregasi akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda di masa depan, menghambat proses integrasi sosial yang lebih luas. Keempat, dampak pada pembentukan karakter dan nilai-nilai toleransi. Modernisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada perilaku siswa sekolah dasar, termasuk dalam hal toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan (Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, 2024).

Faktor struktural merupakan penyebab fundamental segregasi sosial dalam pendidikan Indonesia. Pertama, sistem pendidikan yang masih belum sepenuhnya inklusif menciptakan

ruang bagi praktik segregasi. Kebijakan pendidikan yang belum mengintegrasikan prinsip-prinsip multikulturalisme secara komprehensif menjadi akar masalah segregasi struktural. Kedua, distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata antar wilayah dan antar sekolah menciptakan stratifikasi dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah urban dan ekonomi kuat memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas, teknologi, dan tenaga pengajar berkualitas dibandingkan sekolah di daerah rural atau ekonomi lemah. Ketiga, regulasi dan pengawasan yang lemah terhadap praktik diskriminasi dalam pendidikan memungkinkan segregasi berlangsung tanpa sanksi yang memadai. Meskipun terdapat peraturan yang melarang diskriminasi, implementasi dan penegakannya masih lemah. Keempat, sistem seleksi dan penerimaan siswa yang tidak transparan sering kali menjadi sarana untuk melakukan segregasi terselubung. Kriteria seleksi yang bias atau tidak objektif dapat digunakan untuk mengecualikan kelompok tertentu dari akses pendidikan berkualitas.

Faktor kultural memiliki peran signifikan dalam perpetuasi segregasi sosial dalam pendidikan. Pertama, nilai-nilai primordialisme yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia menciptakan preferensi untuk berinteraksi dengan kelompok yang sama secara etnis, agama, atau budaya. Hal ini tercermin dalam pilihan sekolah dan pola interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan. Kedua, stereotip dan prasangka yang mengakar dalam masyarakat terhadap kelompok tertentu mempengaruhi persepsi dan perilaku dalam konteks pendidikan. Stereotip negatif terhadap etnis, agama, atau kelas sosial tertentu dapat menjadi justifikasi untuk praktik segregasi. Ketiga, tradisi dan praktik budaya yang ekslusif dalam beberapa komunitas dapat menciptakan barrier dalam integrasi sosial. Beberapa kelompok budaya memiliki tradisi untuk mempertahankan homogenitas internal yang dapat menghambat proses integrasi dalam konteks pendidikan multikultural. Keempat, keterbatasan pemahaman tentang nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat menjadi faktor penyebab segregasi kultural. Kurangnya apresiasi terhadap keberagaman sebagai kekuatan dapat mendorong preferensi untuk homogenitas.

Faktor individual berperan penting dalam dinamika segregasi sosial dalam pendidikan. Pertama, preferensi personal untuk berinteraksi dengan kelompok yang sama (*homophily*) merupakan kecenderungan natural manusia yang dapat diperkuat oleh kondisi sosial yang mendukung segregasi. Kedua, tingkat pendidikan dan awareness orang tua terhadap pentingnya pendidikan multikultural mempengaruhi pilihan sekolah dan pola interaksi sosial anak. Orang tua dengan pemahaman yang terbatas tentang nilai pluralisme cenderung memilih lingkungan pendidikan yang homogen untuk anak-anak mereka. Ketiga, pengalaman personal terkait konflik atau diskriminasi dapat membentuk sikap defensif dan cenderung segregatif. Individu yang pernah mengalami diskriminasi mungkin memilih untuk menghindari interaksi lintas kelompok sebagai mekanisme proteksi diri. Keempat, keterbatasan kemampuan adaptasi budaya dan sosial dapat mendorong individu untuk memilih lingkungan yang familiar dan nyaman. Hal ini terlihat jelas dalam kasus mahasiswa perantau yang cenderung membentuk komunitas eksklusif berdasarkan asal daerah. Kelima, faktor ekonomi individual yang berinteraksi dengan aspirasi pendidikan dapat menciptakan

segregasi berbasis kemampuan finansial. Keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas mungkin tidak memiliki pilihan selain menerima segregasi sebagai konsekuensi dari keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.

3.4. Solusi Berbasis Filsafat Pendidikan Islam

Paradigma baru pendidikan Islam multikultural harus dibangun berdasarkan pemahaman yang holistik tentang ajaran Islam yang *rahmatan lil alamiin*. Nasri dan Tabibuddin (2023) menekankan pentingnya revitalisasi fungsi pendidikan Islam dalam konteks multikultural melalui paradigma moderasi beragama yang mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan apresiasi terhadap keberagaman. Pendidikan Islam yang berorientasi multikultural tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan dogma, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup dengan nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan harmoni di tengah perbedaan.

Paradigma ini mengakui bahwa keberagaman budaya, agama, dan etnis memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan manusia sebagai sunnatullah. Pendekatan multikultural dalam pendidikan Islam memposisikan keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai rahmat yang harus dikelola dengan bijaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam multikultural bersumber dari nilai-nilai fundamental Islam yang universal. Pertama, prinsip *tawhid* yang menekankan kesatuan dalam keberagaman, di mana semua perbedaan adalah manifestasi dari keesaan Allah. Kedua, prinsip *rahmah* yang mengutamakan kasih sayang dan empati dalam berinteraksi dengan sesama, terlepas dari latar belakang agama, budaya, atau etnis. Ketiga, prinsip *adil* yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu tanpa diskriminasi. Keempat, prinsip *hikmah* yang mengajarkan kebijaksanaan dalam memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari rencana Ilahi.

3.5. Strategi Implementasi Pendidikan Multikultural Islam

Transformasi kurikulum pendidikan Islam multikultural memerlukan perubahan mendasar dalam struktur dan konten pembelajaran. Strategi transformasi kurikulum harus mencakup penggunaan kurikulum yang terbuka terhadap keragaman dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memfasilitasi dialog dan interaksi antarbudaya. Kurikulum yang dikembangkan harus mengintegrasikan perspektif multikultural dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya sebagai materi tambahan.

Implementasi kurikulum multikultural dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan konteks keberagaman lokal dan global. Hal ini mencakup pengembangan materi pembelajaran yang menampilkan berbagai perspektif budaya, sejarah, dan tradisi dalam kerangka ajaran Islam yang universal.

Inovasi metode pembelajaran dalam pendidikan Islam multikultural harus mengutamakan pendekatan yang interaktif, partisipatif, dan inklusif. Metode pembelajaran yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar dan latar belakang

budaya siswa. Pembelajaran berbasis proyek kolaboratif antarbudaya, diskusi kelompok heterogen, dan simulasi situasi multikultural dapat menjadi strategi efektif dalam membangun pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi kunci inovasi metode pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan akses ke berbagai sumber pembelajaran multikultural, memfasilitasi komunikasi lintas budaya, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan beragam.

Pemberdayaan pendidik merupakan elemen kunci dalam implementasi pendidikan Islam multikultural. Pendidik harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang filosofi pendidikan multikultural Islam, kompetensi dalam mengelola keberagaman di kelas, dan keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Program pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan toleran. Pendidik juga harus menjadi model dalam menerapkan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan teladan yang nyata bagi siswa tentang bagaimana menjalani kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

3. 6. Model Implementasi Bertahap

Tahap persiapan merupakan fondasi yang krusial dalam implementasi pendidikan Islam multikultural. Pada tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting institusi pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya organisasi. Persiapan juga mencakup pengembangan visi dan misi yang jelas tentang pendidikan multikultural Islam, sosialisasi kepada seluruh stakeholder, dan pembentukan tim implementasi yang kompeten. Selain itu, tahap persiapan juga melibatkan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti penyediaan sumber daya pembelajaran multikultural, pelatihan awal untuk pendidik, dan pengembangan sistem evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural.

Tahap implementasi melibatkan pelaksanaan program pendidikan Islam multikultural secara bertahap dan terukur. Implementasi dimulai dengan *pilot project* di beberapa kelas atau mata pelajaran tertentu, kemudian diperluas secara gradual berdasarkan evaluasi dan pembelajaran. Pada tahap ini, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Implementasi juga mencakup pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga lain yang mendukung pendidikan multikultural. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai multikultural.

Tahap institusionalisasi bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kelembagaan pendidikan Islam multikultural. Pada tahap ini, program pendidikan multikultural telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan institusi, dengan dukungan kebijakan, struktur organisasi, dan budaya yang mendukung. Institusionalisasi juga mencakup pengembangan *system quality assurance* yang memastikan standar kualitas pendidikan

multikultural terjaga secara konsisten. Selain itu, tahap institusionalisasi melibatkan pengembangan jaringan dan kemitraan strategis dengan berbagai institusi pendidikan lain dan *best practices* dalam implementasi pendidikan Islam multikultural. Hal ini penting untuk menciptakan gerakan pendidikan multikultural yang lebih luas dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural dalam filsafat pendidikan Islam bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial di lingkungan pendidikan dengan mengakui serta menghargai keberagaman agama, etnis, dan budaya. Konsep ini menekankan pentingnya transformasi struktural dalam sistem pendidikan agar semua siswa memperoleh kesempatan yang sama, serta mengembangkan sikap toleran, respek, dan empati melalui kurikulum yang inklusif, interaksi antarbudaya, dan penerapan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kasih sayang. Landasan teologis pendidikan multikultural dalam Islam sangat kuat, sebagaimana tercermin dalam prinsip “li ta’arafu” dan “rahmatan lil ‘alamin,” yang menegaskan pentingnya saling mengenal, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.

Namun, realitas di Indonesia masih menunjukkan adanya segregasi sosial berbasis agama dan etnis di lingkungan pendidikan. Fenomena ini terlihat dari kecenderungan pembentukan institusi pendidikan yang homogen, kurikulum yang kurang inklusif, serta interaksi sosial yang terbatas antar kelompok berbeda. Segregasi ini berpotensi menghambat terciptanya keadilan sosial dan integrasi nasional. Maka, implementasi pendidikan multikultural secara sistemik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi diskriminasi, memperkuat identitas Islam yang moderat, serta membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman.

REFERENSI

- Anwar, S. (2021). Building multicultural awareness through interfaith dialogue in Indonesian Islamic education. *Journal of Islamic Education*, 15(2), 89-105.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Cathrin, P., & Wikandaru, R. (2023). Multicultural education challenges in Indonesian diverse society. *International Journal of Education and Social Sciences*, 8(3), 245-260.
- Dewi, R. K., & Sari, M. P. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam transformasi pendidikan Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(2), 123- 138.
- Hadi, S., & Wekke, I. S. (2017). Multicultural education reality in Indonesia: A critical analysis. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 5(4), 67-78.
- Hartono, B., & Lestari, D. (2022). Efektivitas pembelajaran hybrid dalam meningkatkan engagement siswa di era digital. *Indonesian Journal of Educational Research*, 8(3), 245- 260.
- Harahap, H., Salminawati, S., Lubis, I., & Harahap, S. (2022). Filsafat Islam pada masa golden age dan kontribusinya dalam dunia pendidikan. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(3), 250-266.
- Human Rights Watch. (2024, October 29). Religious intolerance, discriminatory regulations against minorities in Indonesia. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2024/10/29/religious-intolerance-discriminatory-regulations-against-minorities-in-indonesia>

against-minorities-indonesia

- Idris, T., Rijal, F., Irwandi, Hanum, R., & Mardhiah, A. (2024). A multicultural approach in Islamic education learning to strengthen the Islamic identity of moderate students in PTKIN Aceh. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(3), 1-15.
- Inayatillah, Kamaruddin, & Anzaikhan, M. (2022). The history of moderate Islam in Indonesia and its influence on the content of national education. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 213-226.
- Kholil, A. (2022). Challenges of implementing multicultural education in Indonesian schools. *Educational Research and Reviews*, 17(8), 289-298.
- Maulidiah, S., Rahman, A., & Sari, D. P. (2023). Multiculturalism as a way of life: Building mutual acceptance in diverse societies. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 125-138.
- Nasr, S. H. (2023). Islamic education and multicultural values: Bridging diversity through spiritual wisdom. *Journal for Multicultural Education*, 17(2), 89-105.